

Jalan Ideologi Dalam Negara Demokrasi

Rocky Gerung

Akademisi pada Departemen Filsafat Universitas Indonesia

Abstrak: *Penelitian ini mengenai jalan ideologi dalam negara demokrasi. Ideologi adalah peralatan psikis. Ia dipergunakan untuk menghubungkan kondisi historis suatu masa ke asal-usulnya di masa depan. Semacam gerak “back to the future”. Pada mekanisme itulah ia menjadi absolut. Sebab, untuk “memiliki” masa depan, ia harus mengagungkan masa lalu, sebagai alasan untuk “kembali ke masa depan”. Ideologi adalah fantasi yang obsesif, yaitu “doa” yang menjamin berlangsungnya masa lalu..., di masa depan. Sesungguhnya, ideologi itu mencari masa depannya ke masa lalu.*

Kata Kunci: *ideologi; negara; demokrasi*

Pendahuluan

Fantasi berbeda dengan imajinasi. Pada imajinasi, obyek imajinasi digambarkan tanpa referensi masa lalu. Sementara fantasi adalah pengulangan suatu “kenikmatan” yang pernah ada, dan karena itu hendak dipelihara sepanjang waktu. Ideologi bekerja dalam fantasi. Tetapi bukan karena masa lalu itu “pernah ada”, melainkan karena hanya itu alasan untuk membayangkan suatu masa depan yang fantastik. Ideologi mengkonsumsi hasrat yang ia produksi secara berlebihan. Karena itu, “rasa” haus adalah kondisi ideologi yang permanen. Psikologi inilah yang mengaktifkan obsesi pada kekuasaan.

Membawa masa lalu kembali ke masa depan, berarti menghentikan sejarah. Ia melihat masa depan dalam psikologi kecemasan, tetapi sekaligus dalam harapan bahwa ia akan “tiba di sana”. Politics of Hope memang bekerja dalam metafisika “the-not-yet”: kemungkinan selalu menunggu. Tetapi untuk memberi kepastian kepada “yang belum ada”, fantasi harus dibuat: bahwa “yang akan tiba” itu sesungguhnya “sudah pernah ada”. Karena itu, sejarah harus ditulis. Maka penulisan sejarah menjadi jalan ideologis untuk mengefisienkan operasi kekuasaan kelak. Dari sudut pandang ideologi, sejarah adalah politik yang sedang dipersiapkan.

Di sinilah politik mulai berkerja. Yaitu “mengamankan” jalan bagi “the-not- yet”, untuk tiba secara “agung”. Sejarah adalah jalan yang dibuat bagi “Sang Agung”. Maka rumus harus ditetapkan: ada banyak “ada”, tetapi hanya boleh ada satu Ada. Jalan lurus itulah yang melahirkan absolutisme, karena pada praktek kekuasaan, metafisika itu berubah menjadi suatu imperatif politik: “ada yang lain, tidak boleh ada”. Bahkan dengan tanda perintah (!), dibelakangnya. Di situ, ideologi membeku menjadi ontologi. Tak ada pluralitas, tak ada jalan alternatif. Ideologi menutup fantasi tentang posibilitas dengan cara menolak antropologi falibilisme. Demokrasi, karena sifat antropologisnya, dengan sendirinya harus dihentikan.

Pancasila pernah ada di jalan itu. Yaitu sebagai peralatan psikis untuk menyingkirkan “kemungkinan yang lain”. Ia pernah ada sebagai “satu Ada”, di Orde Lama, juga di Orde Baru. Trauma itulah yang hendak dihilangkan hari- hari ini, yaitu ketika kita tak memiliki fantasi alternatif untuk “menemui masa depan”. Globalisasi adalah kecemasan. Ia membuat kita gagap dan gagu. Tetapi Pancasila juga belum pulih dari trauma, untuk mampu secara utuh, menawarkan “kerangka pikir” masa depan. Dalam kondisi hegemonik finance capitalism, kemarahan pada “peradaban global” akan terasa sebagai frustrasi psikosomatik, karena kapitalisme tidak lagi identik dengan produksi dan akumulasi, melainkan lebih sebagai persoalan semiotika konsumsi. Bahkan pada tindakan revolusioner semacam “Duduki Wallstreet”, ideologi bukan sponsor

utamanya, karena fantasi tentang keadilan tidak hendak dikembalikan pada ordodoksi Marxisme. Teori determinasi ekonomi telah beralih pada semiotika translasi: bahwa kapitalisme telah menyatu dalam konsumsi “pop-culture”, sehingga revolusi tidak lagi bermakna transformasi total. Akibatnya, harapan pada keadilan sosial dalam Pancasila, tak terumuskan dalam konstruksi hegemonik itu.

Inilah soal utamanya: memaksakan norma yang traumatik kepada kondisi “politics of hope”, justeru mengundang balik konfrontasi politik. Tetapi sebaliknya, tanpa acuan sosial yang komprehensif, bangsa seperti susah melangkah. Pancasila hari ini ada dalam obsesi menjadi acuan sosial komprehensif, sesuatu yang terlalu berat bagi mereka yang memelihara politics of memory yang buruk, juga bagi mereka yang memandang dunia dari politics of hope yang berbeda. Memastikan dan memaksakan Pancasila secara normatif, tak mungkin dengan mengaktifkan politik stigmatik seperti pernah dilakukan di waktu lalu. Kesulitan ini harus diperhatikan mendahului semua keinginan politik yang sarat retorik hari-hari ini. Pertanyaan tentang isi filosofi Pancasila tak mungkin sekedar dijawab dengan retorika : “bukan ini bukan itu”, atau “anti ini, anti itu”. Terlebih bila diskursus tentang Pancasila dikendalikan oleh klaim genealogis yang posesif, bahwa “hanya kami yang paham keaslian Pancasila”. Pertengkaran berbasis “hak sejarah” adalah pertanda bahwa ideologi memang tak komprehensif. Ideologi harus diterangkan melalui kerangka materialnya, yaitu sebagai manifestasi dari suatu pembentukan sosial yang radikal. Kita bisa bandingkan proses itu dengan pembentukan satu sila Revolusi Perancis: “Kesetaraan, Persaudaraan, Kebebasan”. Sosiologi dibelakang sila itulah yang menjadikannya menetap sebagai “prinsip solidaritas” rakyat Perancis. Versi Albert Camus, bahkan membekaskan radikalitas itu ke tingkat filosofi: “Perlawanan, Pemberontakan dan Kematian”. Sakralisasi Pancasila belum sedalam itu.

Lepas dari kondisi psiko-politiko-historis itu, Pancasila itu sendiri masih memerlukan “penguatan metodologi”, bila ia hendak diterangkan sebagai sebuah diskursus ideologi. Artinya bukan saja tafsir “bijaksana” terhadap sila- silanya yang perlu diusahakan, melainkan juga konstruksi koheren dari kaitan antar silanya. Sebab, sebuah ideologi adalah jalan pikiran yang disusun logis, tak boleh mengandung kontradiksi. Ideologi “terbuka” sekalipun, harus diperlihatkan dalam susunan yang “tertutup”, yaitu dalam metodologi yang teguh. Artinya, Pancasila harus siap diuji secara akademik bila hendak diajukan sebagai suatu “jalan pikiran”.

Saya berpendapat bahwa Pancasila, sebagai diskursus ideologi, tak cukup kuat untuk diuji dalam debat akademik yang ketat. Terutama karena kecenderungannya untuk menyerap “semua golongan”, maka Pancasila lebih tepat disebut sebagai “kerangka kebudayaan”, ketimbang “dasar negara”. Ini tentu lain soal dengan ketetapan politik yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Justeru pembelaan yang meledak-ledaklah yang memperlihatkan kelemahan metodologis dari Pancasila.

Dengan kata lain, Pancasila yang tidak diterangkan dengan argumentasi yang lurus dan tuntas, justeru akan mengalami defisit filosofis bila ia hanya dibela berdasarkan sentimen nasionalisme yang tinggi. Menghadapkan Pancasila pada globalisasi, terorisme, dan politik identitas, sekedar sebagai “benteng moral” kebangsaan dan kejayaan masa lalu, tentu bukan cara cerdas untuk meyakinkan keunggulan alam pikiran yang dikandung Pancasila. Bijak tak sama dengan logis.

Pendekatan yang terlalu fungsional terhadap Pancasila, justeru mengurangi fungsi sistem demokrasi sebagai mekanisme terbuka dalam menyelesaikan konflik politik. Demokrasi bekerja mengolah ruang politik agar tak dihuni secara permanen oleh doktrin. Demokrasi menyediakan ruang kompetisi, tetapi bukan untuk diisi oleh obsesi-obsesi metafisik. Di sinilah ujian pertama

bagi Pancasila: kompatibelkah ia dengan sistem demokrasi yang justeru menolak finalitas?

Pancasila yang digambarkan sebagai “pandangan hidup” bangsa, terasa terlalu ontologis dalam ruang lentur demokrasi. Republik adalah cara hidup bersama, tetapi tujuan hidup individu hanya dapat diselenggarakan dalam kultur demokrasi, yaitu kultur yang mempertahankan kondisi falibilis masa depan. Pancasila tidak dapat dibela secara reaksioner, karena demokrasi memungkinkan pikiran berayun dalam kemungkinan. Seorang Badui pasti tak ingin tidur di ranjang Procrustes.

Suatu gambaran akademis tentang “susunan pikiran” Pancasila, memperlihatkan bahwa “ideologi” itu adalah ramuan yang berisi berbagai “alam pikiran dunia”. Tidak khas negeri ini. Pada semua sila-nya, unsur-unsur “asing” terlihat jelas: “monoteisme”, “humanisme”, “nasionalisme”, “demokrasi”, sosialisme”. Interpretasi Sukarno tentang “masa depan di masa lalu”, mengarahkan asal-usul Pancasila kepada kebijaksanaan hidup nenek moyang negeri ini. Dalam pencarian nasionalisme itu, Pancasila harus dibayangkan dalam metafor atavistik: “digali dari dalam bumi Indonesia”. Tetapi mudah diterangkan bahwa Sukarno pada zaman itu, justeru banyak membaca “alam pikiran barat”, sumber yang lebih dekat dengan alam pikiran modern, dalam keperluan untuk mengevaluasi kondisi kolonial.

Pada kondisi struktural kolonial, ide keadilan sosial adalah lebih dekat pada Marxisme, ketimbang kebijaksanaan “gotong-royong” yang berkonteks terlalu kultural. Juga dapat dipikirkan bahwa gagasan nasionalisme pada sila ketiga, tak mungkin lepas dari lalulintas pikiran Eropa yang menumbuhkan ide otonomi teritori sejak abad 18. Demikian juga ide demokrasi dan humanisme yang terus tumbuh setelah dunia barat menyelesaikan revolusi nasional di Amerika dan revolusi sosial di Perancis, tentu dikenal baik oleh Sukarno. Bahkan konsep monoteisme pada sila pertama, jelas bukan khas tanah air. Monoteisme sudah berkembang matang di dunia barat, pada saat animisme dan panteisme menjadi pegangan kepercayaan nenek moyang kita. Sukarno membaca dunia, dan Pancasila tak sepenuhnya “digali dari bumi Indonesia”.

Tak ada yang perlu disesali dalam dunia ide. Lalulintas pikiran adalah sejarah bersama manusia. Justeru karena itu ada solidaritas global menghadapi penindaasan dan ketidakadilan kolonial. Tetapi justeru juga di situ, kultus nasionalisme bertumbuh. Yaitu pemujaan berlebih terhadap “identitas nasional”, dengan akibat tumbuhnya benih fasisme dalam kultur politik kita. Demokrasi berkali-kali dihentikan oleh kultur sejenis itu. Ketakcukupan metodologis pada “Ideologi Pancasila” harus diterangkan pada kerangka “context of discovery” susunan pikiran itu. Artinya, sejarah pembentukan nasionalisme kita tidak berbasis pada semacam “perjuangan kelas”, juga tidak pada “pembentukan modernitas”, sebagaimana terjadi pada sejarah bangsa lain. Suatu kondisi poskolonial hari-hari ini bahkan seperti kehilangan metodologi, sebagai suatu “alat penjelas”, karena kultur kolonial itu tak menjejak dalam historitas kita hari ini. Sebaliknya, feodalisme telah kembali menyusup dalam kultur politik, pada lapis birokrasi, partai dan komunikasi warganegara. Bahkan di Perguruan Tinggi, reproduksi kultur itu telah melahirkan “tubuh-tubuh yang membungkuk”, yang ditundukkan oleh hirarki jabatan, dan bukan oleh kapasitas kecerdasan. Tubuh otentik, tubuh yang tumbuh karena pikiran bebas, sering takluk pada tubuh metafisik, tubuh yang dikuasai doktrin kesolehan.

Dalam sejarah pembentukan nasionalisme Jerman, misalnya, kebudayaan (kultur) telah dijadikan unsur ideologis untuk mengikat solidaritas yang obsesif demi menghidupkan kembali keagungan masa lalu bangsa itu, setelah dikalahkan dalam perang, dan demi membentengi identitas bangsa dari peradaban (civilization) yang dipandang oleh bangsa Jerman sebagai “kekuatan asing”. Ideologi memerlukan fantasi, bukan sekedar dalam dimensi nostalgia, tetapi

juga dalam obsesi identitas. Politik identitas inilah yang kelak mensponsori kampanye ultranasionalis fasis dalam upaya memanipulasi kecemasan dan keputusan bangsa. Teorisi mutakhir dan filsafat romantik diajukan untuk menyelesaikan kecemasan antropologis itu. Tetapi ketika kekuasaan telah diperoleh, filsafat dengan cepat berubah menjadi aturan rezim. Regimentasi menghasilkan regulasi. Regulasi menghasilkan politik eugenik. Katastrofi inilah yang selalu menandai hasil akhir politik ideologi di abad lalu.

Kesimpulan

Pancasila hari ini menjadi semacam “kebutuhan” atas sebuah “filsafat politik” yang dibayangkan dapat menghasilkan “etika politik” untuk mengatur kesehatan republik. Persoalannya adalah: kesehatan sebuah republik tidak ditentukan oleh diet ideologi. Apalagi sekedar membebaskan infeksi moral kepada individualisme, liberalisme, pluralisme dan sekulerisme. Pancasila bukan ideologi reaksioner. Ia justru kekurangan perspektif bila sekedar diaktifkan sebagai “ideologi penangkal”. Juga bila ia diadministrasikan lagi ke dalam “kurikulum penataran”. Kita memerlukan lebih banyak demokrasi untuk menghidupkan individualisme. Bukan untuk memuliakan “kepentingan diri”, melainkan untuk menghidupkan kebebasan menjadi diri sendiri. Solidaritas yang rasional hanya tumbuh diantara manusia merdeka.

“Kebebasan itu ibarat buah bergizi. Baik untuk tubuh. Tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya”.

- J.J. Rousseau –

Bibliografi

- Alexander, Denis and Numbers, Ronald. *Biology and Ideology: From Descartes to Dawkins*. The University of Chicago Press, 2010.
- Butler, Laclau, and Zizek. *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*. Verso, 2000.
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Polity Press, 2007.
- Ingram, David. *Reason, History, & Politics*. State University of New York Press, 1995
- Macintyre, Alasdair. *Ethics and Politics*. Cambridge University Press, 2006
- Schacter, Daniel.L. (Ed). *Memory Distortion: How Minds, Brains, And Societies Reconstruct The Past*. Harvard University Press, 1997.